

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH



DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Lingkar Timur Komplek Islamic Center Lantai 3
Muara Dua, Prabumulih Timur Provinsi Sumatera Selatan
Kode 31114

Website : www.disketapangprabumulih.com

E-mail : ketahananpangan71@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada Tahun 2025. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada tahun 2025 serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Prabumulih, 9 Februari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Titing,SP
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 197212311994032024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	8
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	9
1.2.2 Anggaran	18
1.3 Dasar Hukum	18
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	19
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	21
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	27
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	28
BAB III.....	34
AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja	35
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	36
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	36
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	56
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	69

3.1.5	Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	73
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	77
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	85
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	86
3.2	Realisasi Anggaran	96
BAB IV		102
PENUTUP		102
LAMPIRAN		104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	18
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025....	23
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah.....	28
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	30
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	36
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	36
Tabel 3.3	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	70
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	73
Tabel 3.2.1	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Prabumulih Tahun 2025	38
Tabel 3.2.2	Rekapitulasi Persediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih di Gudang PERUM BULOG KANWIL SUMSEL DAN BABEL Tahun 2013 – 2025.....	43
Tabel 3.2.3	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Prabumulih Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2025	44
Tabel 3.2.4	Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas.....	46
Tabel 3.2.5	Sebaran Jumlah Desa Prioritas 4 - 6 berdasarkan Kecamatan...	47
Tabel 3.2.6	Hasil Uji Tes Residu Pestisida Sayuran.....	50
Tabel 3.2.7	Hasil Uji Tes Residu Pestisida Buah	52
Tabel 3.2.8	Penilaian SAKIP Tahun 2025 (untuk tahun 2024).....	55
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	56
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	70

Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	70
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	85
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	88
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi	17
Gambar 3.2	Jumlah Desa / Kel berdasarkan Prioritas Kota Prabumulih 2025	47
Gambar 3.3	Sebaran Jumlah Desa/Kelurahan Priroitas 4 - 6 Per Kecamatan.....	45
Gambar 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	61
Gambar 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	62
Gambar 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).....	64
Gambar 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	65
Gambar 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman.....	66
Gambar 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kemampuan Perangkat Daerah	68
Gambar 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kemampuan Perangkat Daerah	69
Gambar 3.11	Efisiensi Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas

Ketahanan Pangan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KETAHANAN PANGAN :

Melalui Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dibentuk Dinas Ketahanan Pangan kota Prabumulih. Pengelolaan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada awalnya dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BPPPPKKP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015.

Sejalan dengan pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas di Bidang Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengacu kepada payung hukum diatas maka dikeluarkan Peraturan Walikota Kota Prabumulih Nomor : 3 Tahun 2025 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas Pokok dan fungsi yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor : 3 Tahun 2025 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas Pokok dan fungsi yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai fungsi mengacu kepada perwako diatas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai fungsi:

KEPALA DINAS

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas: membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Walikota

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas

- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
 - c. Pelaksanaan Penyusunan Anggaran;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut;
 - f. Pelaksanaan Pengelolaan data dan kerjasama
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi ;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana:
 - i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Sekretaris Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung dan ketahanan pangan lainnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pemberiaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur

pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (4) Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tentang konsumsi dan keamanan pangan: dan
 - b. melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan: dan
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

- (4) Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang konsumsi dan keamanan pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

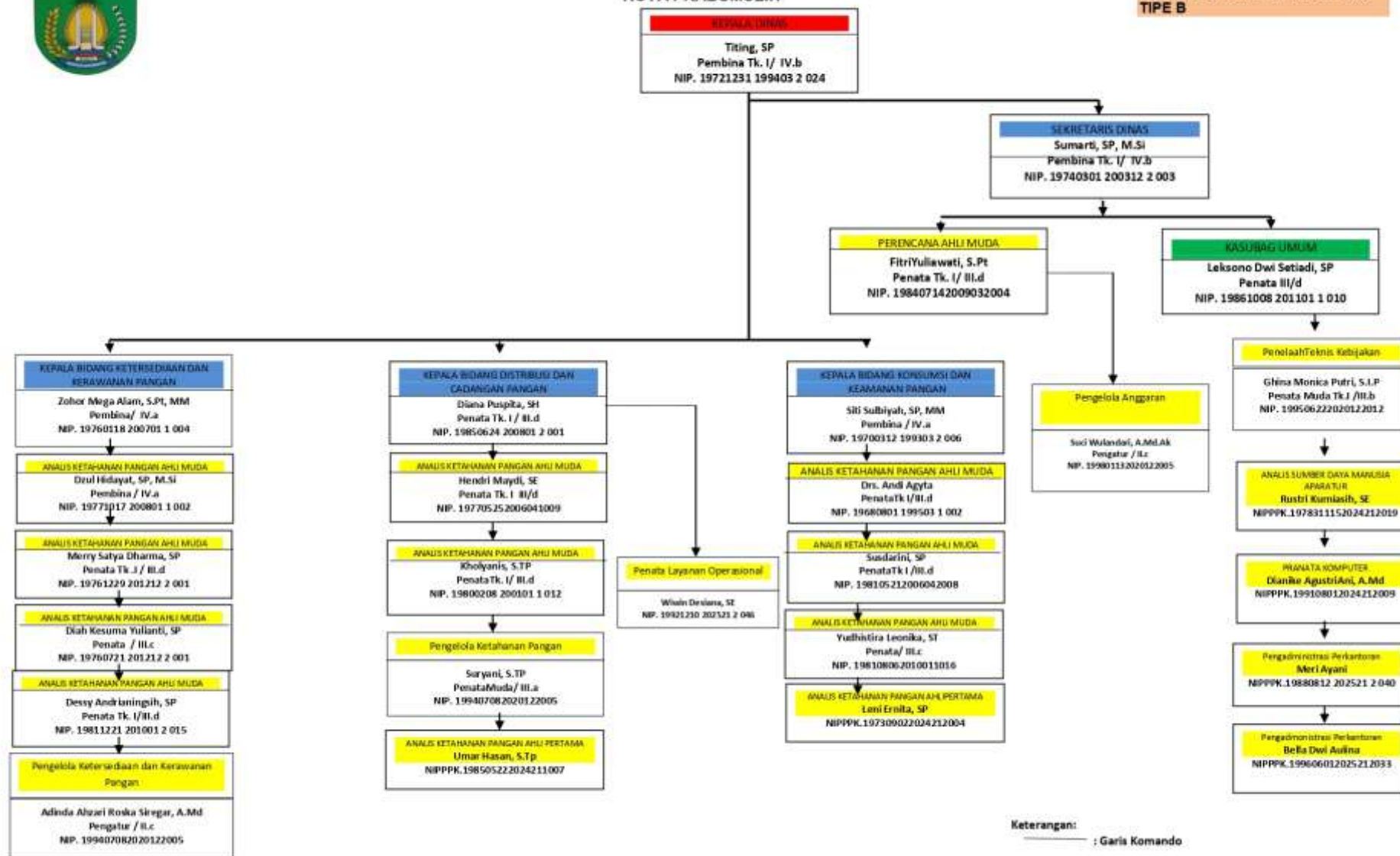
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama:
 - b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya:
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025
TIPE B



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

1.2.2 Anggaran

Pada Tahun 2025 Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih bersumber dari dana APBD. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp 4.663.211.700
APBD	2025	Rp 5.567.109.104

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2024 dan 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Matriks Renstra (5 tahun)
3. LHE SAKIP Tahun 2024
4. TL LHE SAKIP Tahun 2024
5. Prestasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Renstra 2024-2026 Kota Prabumulih adalah meningkatnya nilai tambah produksi industri dan meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7
1.1.	Terciptanya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi yang Merata	1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Karegori Industri Pengolahan	4,71	4,95	5,25
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,1	94,3	94,6
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7.8 Ton	7.8 Ton	7.8 Ton
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2	93,7	96,8
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%	0%	0%
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1.4.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1.4.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	70	75	80
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	70	74	78
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%

Sumber : Renstra DINAS KETAHANAN PANGAN Periode 2024 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	1.1.1.1#0.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan adalah angka kualitas ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah berupa komposisi sembilan kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kecukupan gizi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ketersediaan yang tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk lebih beragam dan seimbang	Skor PPH = %AKE x bobot dibandingkan dengan Skor Maksimum	Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	1.1.1.2#0.1	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	Ton	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah persediaan pangan pokok yang dikelola oleh pemerintah bertujuan untuk: 1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah 2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana 3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga	CBPK = $[(A+P)/2] \times 75\% \text{ CBD}$	PERUM BULOG KANWIL SUMSEL BABEL, dan Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.3	Meningkatnya	1.1.1.3#0.1	Pencapaian Skor	Angka	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH Konsumsi = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot	Data Survei

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		Konsumsi adalah indikator yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan suatu daerah yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor PPH Konsumsi memiliki nilai maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.	masing-masing kelompok pangan yang sudah ditetapkan	Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	1.1.1.4#0.1	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	Prosentase	Menurunnya daerah rentan rawan pangan adalah indikasi positif yang menunjukkan ketahanan pangan di suatu negara semakin membaik. Kerawanan pangan adalah kondisi ketika wilayah atau individu tidak memiliki cukup pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.	Persentase daerah rentan rawan pangan = Jumlah Desa/Kel Pada Prioritas 1 s/d 3 dibagi jumlah desa/kel di Kota Prabumulih	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, DiSDUKCAPIL, DISPERINDAG, dan BAPPEDA
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	1.1.1.5#0.1	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Prosentase	Keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman adalah upaya untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan yang bergizi seimbang dan aman. Pangan yang sehat dan aman disebut juga dengan pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman). Kegiatan ini untuk memastikan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di masyarakat. Pengawasan PSAT dilakukan untuk mencegah PSAT terkontaminasi oleh bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.	1. Pengawasan di Peredaran Data yang dibutuhkan: a. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T) b. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N) c. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P) Capaian Pengawasan di Peredaran (Post market): Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) = $P/N \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					Bahan-bahan tersebut bisa berupa pestisida, mikotoksin, dan logam berat.	Capaian (K) = $Y/T \times 100\%$ Capaian Tertimbang (K1) = $K \times 60\%$ 2. Registrasi dan Sertifikasi (pre market) Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT, rumah kemas, health certificate (HC). a. Capaian Provinsi Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun Capaian (X) $>250 = 100\%$ $151 - \leq 250 = 80\%$ $101 - \leq 150 = 60\%$ $51 - \leq 100 = 40\%$ $< 50 = 20\%$ Capaian tertimbang (K2) = $40\% \times X$	
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1.4.1.1#0.1	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	nilai	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan	$AA = > 90 - 100$ $A = > 80 - 90$ $BB = > 70 - 80$ $B = > 60 - 70$ $CC = > 50 - 60$ $C = > 30 - 50$ $D = 0 - 30$	Inspektorat Kota Prabumulih
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	1.4.1.1#0.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	prosentase	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan rekomendasi	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan dibagi jumlah laporan hasil pengawasan dikali 100%	Inspektorat Kota Prabumulih

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Keuangan Perangkat Daerah				hasil pengawasan. TLHP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan cara mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.		

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berikut Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
-1	-2	-3		-4	-5	-6
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	94,3
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	Ton	7,8
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	93,7

1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	Prosentase	2,7
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	prosentase	100
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai	74
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase	100

Sumber : Rencana Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,3
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8 ton
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,7
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	0 %
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1.1.1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	94,3
1.1.1.1.1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100
1.1.1.1.1.1.1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1
1.1.1.1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1
1.1.1.1.1.1.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30
1.1.1.1.1.1.4	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen	23
1.1.1.1.1.1.5	pengembangan Usaha Pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1
1.1.1.1.1.1.6	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4
1.1.1.1.1.1.7	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	48
1.1.1.1.1.1.8	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	13
1.1.1.1.1.1.9	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	48
1.1.1.1.1.1.10	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1

1.1.1.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8
1.1.1.2.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	100
1.1.1.2.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1
1.1.1.2.1.1.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	10
1.1.1.2.1.1.4	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10
1.1.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,7
1.1.1.3.1.1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	100
1.1.1.3.1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1
1.1.1.3.1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4
1.1.1.4.1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7
1.1.1.4.1.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Daerah Rawan Pangan	100
1.1.1.4.1.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimuktahirkan	1
1.1.1.4.1.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan	100
1.1.1.4.1.2.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan	1
1.1.1.5.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100

1.1.1.5.1.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100
1.1.1.5.1.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1
1.1.1.5.1.1.3	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1
1.4.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74
1.4.1.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah disampaikan tepat waktu	100
1.4.1.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1
1.4.1.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
1.4.1.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
1.4.1.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1
1.4.1.1.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
1.4.1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu	100
1.4.1.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25
1.4.1.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1
1.4.1.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.4.1.1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
1.4.1.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang Disampaikan Tepat Waktu	100

1.4.1.1.1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12
1.4.1.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100
1.4.1.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30
1.4.1.1.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3
1.4.1.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100
1.4.1.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3
1.4.1.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
1.4.1.1.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4
1.4.1.1.1.5.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2
1.4.1.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
1.4.1.1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100
1.4.1.1.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1
1.4.1.1.1.6.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8
1.4.1.1.1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6
1.4.1.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100
1.4.1.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
1.4.1.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100

1.4.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19
1.4.1.1.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,3	94,34	100,04	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3	7.8	6,4	82,05	tinggi	PERUM BULOG KANWIL SUMSEL BABEL, dan Dinas Ketahanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(Tiga) Tahun					Pangan
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,7	91,24	97,37	Sangat tinggi	Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	0	0	100	Sangat tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, DiSDUKCAPIL, DISPERINDAG, dan BAPPEDA
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100	78,56	78,56	Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74	74,34	100,4	Sangat tinggi	Inspektorat Kota Prabumulih
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100	Sangat tinggi	Inspektorat Kota Prabumulih

Sumber : Laporan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" tahun 2025 adalah sebesar 94,34 dari target sebesar 94,30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,04 %. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Kondisi Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Prabumulih berdasarkan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 dibawah ini :

Tabel 3.2.1
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca
Bahan Makanan Kota Prabumulih
Tahun 2025

No	Kelompok Bahan Pangan	2024		2025	
		Energi (kkal)	Skor PPH	Energi (kkal)	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.154	24,04	1.152	23,99
2.	Umbi-umbian	98	2,05	26	0,54
3.	Pangan Hewani	334	13,9	337	24,00
4.	Minyak dan Lemak	556	24,00	554	5,00
5.	Buah/Biji Berminyak	10	0,21	0	0
6.	Kacang-kacangan	107	8,95	100	8,31
7.	Gula	188	2,50	188	3,91
8.	Sayuran dan Buah	134	27,84	148	30,00
9.	Lain-lain	-	-	-	0
	Jumlah	2.588	94,59	2.505	94,34

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di Kota Prabumulih Tahun 2025 berdasarkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah sebesar **94,34** yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 94,59. Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula dan sayuran dan buah, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian dan kelompok Kacang Kacangan.

Skor PPH Konsumsi tahun 2025 adalah sebesar 91,24, dimana skor PPH Ketersediaan sudah diatas skor PPH Konsumsi. Hal ini diakibatkan oleh belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat di Prabumulih. Dengan ditunjukkan dari konsumsi kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian, dan kelompok sayur-sayuran dan buah yang masih rendah. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh :

- 1) Masih rendahnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang masih rendah
- 2) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman.
- 3) Masih terbatasnya akses terhadap komoditas pangan
- 4) Sistem distribusi pangan yang belum efektif dan efisien

- 5) Produksi beberapa komoditas pangan yang masih rendah sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat mempengaruhi harga komoditas pangan di pasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pangan yang tersedia maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keseimbangan ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan melalui penambahan tingkat ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan. Untuk mendukung pencapaian target skor mutu pangan tersebut, dibutuhkan ketersediaan komoditas pangan dengan jumlah dan komposisi yang memadai. Untuk dapat mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan, perlu diketahui kemampuan produksi pangan Kota Prabumulih. Mengingat potensi Prabumulih di bidang pertanian masih cukup baik maka peningkatan produksi beberapa komoditas pangan seperti kelompok buah/biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Kacang Kacangan, kelompok sayuran dan buahan perlu terus dipacu sehingga dapat mempercepat waktu pencapaian skor normal mutu pangan PPH sebesar 100. Upaya perbaikan kualitas ketersediaan pangan ini harus ditempuh dengan pendekatan aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Penyediaan pangan diutamakan melalui peningkatan produksi dalam daerah dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan konsumen.
- 2) Pengembangan sistem distribusi yang efisien dengan jangkauan wilayah pedesaan dan daerah terpencil sehingga harga di pasaran dapat ditekan.
- 3) Penciptaan mekanisme daya beli pasar yang mendukung terbentuknya harga yang terjangkau dan mampu memberikan insentif bagi produsen untuk menghasilkan produksi pangan.

- 4) Keterlibatan pemerintah dan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal.
- 5) Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan.

1.1.1.2 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton)
Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun

Capaian indikator kinerja “Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun” tahun 2025 adalah sebesar 6,4 ton dari target 7,8 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82,05 %. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota merupakan rangkaian proses pengadaan komoditas beras milik Pemerintah Kota Prabumulih. Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Prabumulih dengan Instansi/ lembaga milik negara ataupun swasta yang mengurus masalah pangan untuk Pemerintah Kota Prabumulih dengan Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel dengan ketentuan:

1. Kualitas Beras yang disediakan adalah kualitas medium.
2. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditentukan oleh Perum BULOG dimana untuk tahun 2025 ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : KD-339/DK000/KU.02.01/12/2024 tentang Harga Jual Beras

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan kepada K/L/D/I Tahun 2024 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp. 12.607,29,-/Kg

3. Tonase Pembelian disesuaikan dengan anggaran APBD Kota Prabumulih TA. 2025 dengan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh Perum BULOG. Total Jumlah Pembelian beras adalah direncanakan sebanyak 10.000 Kg namun terealisasi sebesar 6.400 Kg dengan total belanja sebanyak Rp. 80.686.656,- (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) hal ini dikarenakan Dikarenakan izin prinsip pengadaan dari pihak Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel baru disetujui di akhir nopember 2025 sehingga ketersediaan anggaran uang persediaan tidak mencukupi untuk pengadaan 10 ton dikarenakan terlalu sedikit dengan waktu untuk melakukan TUP, selain itu diawal desember ada perubahan PA yang memerlukan waktu untuk perubahan administrasinya sedangkan penutupan administrasi akhir tahun di awal Desember.
4. Jika terdapat perubahan harga pembelian beras sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, maka dalam kontrak/PJB agar dicantumkan klausul addendum penyesuaian harga/kuantum sesuai dengan harga yang berlaku dalam Keputusan Direksi mengenai Penetapan HPB.
5. Sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 4, 547 Ton dimana beras yang dititipkan Desember Tahun 2025 menjadi 10,947 Ton

Berikut rekapitulasi persediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah kota prabumulih di gudang PERUM BULOG KANWIL SUMSEL DAN BABEL tahun 2013 s.d 2025

Tabel 3.2.2

REKAPITULASI PERSEDIAAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PRABUMULIH										
DI GUDANG PERUM BULOG KANWIL SUMSEL DAN BABEL TAHUN 2013 - 2025										
No	Jenis Kegiatan	Tahun	Volume Beras (Kg)			Harga Satuan (Rp/Kg)	Nilai (Rp)	Stok Akhir Beras (Kg)	Nilai Stock Akhir (Rp)	Keterangan
			Pengadaan	Penyaluran	Addendum Harga/Vol					
1	Pengadaan	2013	11.610			7.752	89.999.095	11.610	89.999.095	
2	Pengadaan	2014	5.055			8.048	40.681.073	16.665	130.680.168	
3	Pengadaan	2015	4.550			8.790	39.994.500	21.215	170.674.668	
4	Penyaluran	2016		16.425			(128.748.648)	4.790	41.926.020	
5	Pengadaan	2017	4.575			8.725	39.916.875	9.365	81.842.895	
6	Pengadaan	2018	3.885			10.276	39.922.260	13.250	121.765.155	
7	Pengadaan	2019	9.510			10.510	99.950.100	22.760	221.715.255	
8	Pengadaan	2020	9.484			10.543	99.989.812	32.244	321.705.067	
9	Addendum Harga Pengadaan 2020	2023			9.484	11.002	4.353.156	32.244	326.058.223	Nilai merupakan selisih harga pengadaan 2020 dengan harga jual 2023
10	Penyaluran	2023		19.980			(192.497.455)	12.264	133.560.768	
11	Pengadaan	2024	9.000			11.498	103.482.000	21.264	237.042.768	
12	Penyaluran	2024		5000			(53.642.240)	16.264	183.400.528	
13	Addendum Kuantum Pengadaan 2020	2024			792	12.348		15.472	183.400.528	Nilai merupakan selisih harga addendum 2023 dengan harga jual 2024
14	Addendum Kuantum Pengadaan 2020	2025			133			15.339	183.400.528	Nilai merupakan selisih harga addendum 2024 dengan harga jual 2025
15	Addendum Kuantum Pengadaan 2024	2025			792			14.547	183.400.528	Nilai merupakan selisih harga addendum 2024 dengan harga jual 2025
16	Penyaluran	2025		10.000			(126.072.900)	4.547	57.327.628	
17	Pengadaan	2025	6.400				80.686.656	10.947	138.014.284	

Sebagai payung hukum proses penyaluran cadangan pangan pada tahun ini pemerintah kota prabumulih sudah menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kota yaitu Perda No 5 Tahun 2025.

1.1.1.3 Sasaran

⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun 2025 yaitu sebesar 91,24 dari target

93,7 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 97,37 %. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. dalam hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.2.3
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota
Prabumulih Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional
Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Berat (Gram/ Kap /hari)	Konsumsi Energi (Gram/kap/ hari)	Konsumsi Protein (Gram/kap/ hari)	SKOR MAKS	Skor PPH
1	Padi-padian	248,86	984,55	22,73	25,00	23,44
2	Umbi-umbian	38,5	47,93	0,56	2,50	1,14
3	Pangan hewani	153,12	279,53	23,91	24,00	24,00
4	Minyak dan lemak	23,75	213,77	0,01	5,00	5,00
5	Buah/biji/ber minyak	0,38	2,21	0,04	1,00	0,05
6	Kacang-kacangan	27,43	60,41	4,56	10,00	5,75
7	Gula	22,08	77,71	0,37	2,50	1,85
8	Sayur dan buah	231,72	126,17	4,01	30,00	30,00
9	Lain-lain	39,42	26,18	0,94	0,00	0,00
	Total		1818,47	57,14		91,24

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2100 Kkal/ Kap/ Hari

Pada tahun 2025 capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Prabumulih 91,24 Terjadi penurunan dari target yang tahun 2025 sebesar 93,7. Dikarenakan terjadi konsumsi yang kurang memadai untuk semua kelompok pangan meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji/berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain2. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional tingkat kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk Kota Prabumulih

menunjukkan bahwa konsumsi energi per hari sebesar 1.818 kkal/kapita yang terdiri dari 9 (sembilan) kelompok pangan hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi penduduk Kota Prabumulih belum mencapai standar yang diharapkan, Namun, konsumsi protein penduduk Kota Prabumulih per hari sebesar 57,14 gram/kapita sudah tercukupi

Berdasarkan uraian diatas tingkat kecukupan gizi konsumsi energi terjadi penurunan pada tahun 2025 hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA.

1.1.1.4 sasaran

⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan" tahun 2025 yaitu sebesar 0% dari target 0% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Persentase daerah rentan rawan pangan

= Jumlah Desa/Kel Pada Prioritas 1 s/d 3 dibagi jumlah desa/kel di Kota Prabumulih

= 0 desa/kel dibagi 37 desa/kel

= 0%

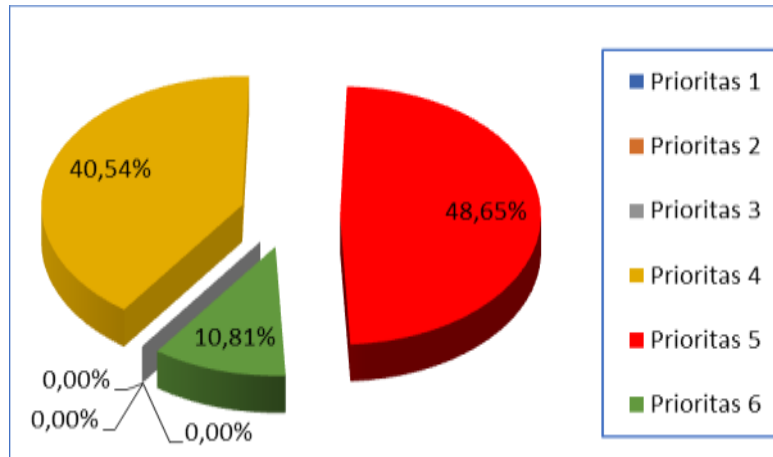
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas.

Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa/kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa/kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa/kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa/kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 37 desa/kelurahan yang ada di Kota Prabumulih maka didapatkan 0 desa/kelurahan (Prioritas 1), 0 desa/kelurahan (Prioritas 2), 0 desa/kelurahan (Prioritas 3), 15 desa (Prioritas 4), 18 desa/kelurahan (Prioritas 5) dan 4 desa/kelurahan (Prioritas 6

Tabel 3.2.4 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

No	Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1	0	0
2	2	0	0
3	3	0	0
4	4	15	40,54
5	5	18	48,65
6	6	4	10,81



**Gambar 3.2 Jumlah Desa /Kel berdasarkan Prioritas
Kota Prabumulih 2025**

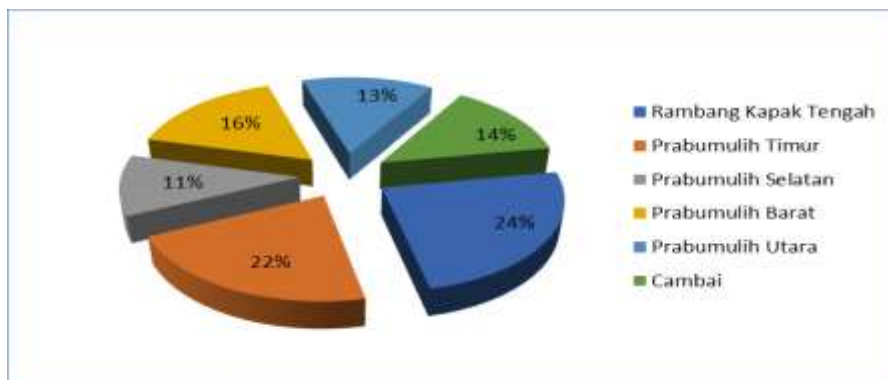
Berdasarkan grafik diatas tidak ada Desa/kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 - 3 yang terdapat di wilayah Kota Prabumulih.

Desa/Kelurahan yang mempunyai ketahanan pangan yang baik dengan prioritas 4 - 6 sebanyak 37 desa Kelurahan yang tesebar di 6 Kecamatan yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5

Sebaran Jumlah Desa Prioritas 4 - 6 berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Persentase
1	Prabumulih Barat	6	16
2	Prabumulih Timur	8	22
3	Rambang Kapak Tengah	9	24
4	Cambai	5	13,5
5	Prabumulih Utara	5	13,5
6	Prabumulih Selatan	4	11



Gambar 3.3 Sebaran Jumlah Desa/Kelurahan Priroitas 4 - 6 Per Kecamatan

Desa/Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 - 3 secara umum disebabkan oleh :

- Jumlah Tenaga Kesehatan tidak berbanding dengan kepadatan Penduduk di wilayah tersebut
- Jumlah RT yang tanpa Akses Air Bersih tinggi didaerah yang masuk Prioritas 2 dan 3 dikarenakan belum masuknya Akses PDAM serta untuk daerah tertentu jenis tanah tidak memungkinkan untuk membuat sumur baik sumur gali maupun sumur bor.
- Rasio Jumlah Penduduk tingkat kesejahteraan terendah juga merupakan penyebabnya, hal ini diakibatkan dari dampak Covid-19 banyak masyarakat yang berkurang tingkat penghasilannya.
- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan yang tersedia kurang cukup jumlahnya dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk di desa/kelurahan tersebut.

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa prioritas 1-3 sudah meningkat ke prioritas 4 – 6 di Kota Prabumulih
- b. Desa-desa yang lokasinya di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain walaupun secara komposit keseluruhan sudah baik tapi untuk per indikatornya masih kurang baik
- c. Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan yang cukup dan memadai sesuai dengan rasio kebutuhan yang ada di wilayah dan mengoptimalkan sumberdaya kesehatan yang ada.
- f. Penyebar luasan informasi tentang keberadaan atau populasi SDM kesehatan di wilayah yang bisa diakses masyarakat (sebagai rujukan, konsultasi kesehatan maupun penanganan permasalahan kesehatan, seperti : Batra/pengobatan tradisional, fisioterapi, gizi kesehatan, kebidanan dan kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan dan kedokteran umum dan gigi).

1.1.1.5 Sasaran

⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Pengujian Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dengan pengambilan sampel sayuran yaitu ketimun, Bawang merah, Bawang Putih, Cabe Merah, Serai, Kunyit, Kentang, Tomat, Kubis Terong, Sawi, wortel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui residu pestisida pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan menggunakan Bioeasy Pestisida Residu Rapi Test Kit. Pengujian dengan alat tersebut merupakan cara mudah untuk mendeteksi apakah terdapat zat berbahaya pada tanaman sayuran seperti zat pestisida yang sering digunakan petani untuk mengusir hama daun pada tanaman sayuran. Setelah dilakukan pengujian kita bisa mengetahui apakah sayuran tersebut terdapat cemaran atau layak untuk dikonsumsi.

Berikut ini tabel hasil uji tes residu pestisida pada sampel sayuran PSAT:

Tabel 3.2.6 Hasil Uji Tes Residu Pestisida Sayuran

No.	Nama SPPG	Komoditi	Hasil Uji Residu Pestisida		Keterangan
			Positif	Negatif	
1.	SPPG Kecamatan Prabumulih Timur Jl. Flores GG. Betano No.	Ketimun	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Bawang Merah	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Bawang Putih	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida

No.	Nama SPPG	Komoditi	Hasil Uji Residu Pestisida		Keterangan
	38 A RT.004 RW.001 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur	Cabai Merah	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Serai	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Kunyit	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
2.	SPPG Kecamatan Prabumulih Selatan Jl. Pertamina – Talang Jimar Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan	Ketimun	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Kentang	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
3.	Pedagang Sayuran Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih	Tomat	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Kubis	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Terong	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Sawi	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida
		Wortel	-	√	Tidak Terdeteksi Residu Pestisida

Pengujian mutu keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu Jamur Tiram, Slada Hidroponik, Jeruk Siam, Jambu Air Pada tanggal 02 Oktober 2025 dilaksanakan pengambilan sampel PSAT oleh Petugas Pengambil Sampel Tim dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Selatan dan tim Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih di kumbung jamur milik Petani Bapak Muhammad Karyo Kelurahan Cambai, Petani Sayuran Hidroponik (sayuran Selada Keriting) Bapak Makmur Suyitno Kelurahan Muara Dua, Petani Jambu Air (jenis citra) Bapak Hasanudin Desa Tanjung Telang dan Petani Jeruk Siam Bapak Suparman Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih. Selanjutnya

dilakukan uji laboratorium Residu Pestisida dan Logam Berat terhadap sampel komoditi mengacu PERBADAN No. 10 dan 15 Tahun 2024 ke PT. Eurofins Angler Biochemlab di Surabaya Berikut ini tabel hasil uji tes residu pestida pada sampel sayuran PSAT

Berikut ini tabel hasil uji tes res pestida pada sampel PSAT

Tabel 3.2.7
Hasil Uji Tes Residu Pestisida Buah

No	Pelaku Usaha	Alamat	Komoditas	Nomor Sertifikat Prima 3	Hasil Uji residu pestisida		Keterangan
					Positif	Negatif	
1	Muhammad Karyo	Jln. Pelangi Gang Tahfiz Kecamatan Cambai Kota Prabumulih	Jamur Tiram	16.74-3-B/II/29-143-11/2025	-	✓	produk dinyatakan aman dikonsumsi/level residu dibawah ambang batas
2	Makmur Suyitno	Jln.Bukit Barisan RT.01RW.10 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Slada Hidroponik	16.74-3-B/II/74-145-11/2025	-	✓	produk dinyatakan aman dikonsumsi/level residu dibawah ambang batas
3	Suparman	Jalan Raya Sungai Medang-Tanjung Kecamatan Cambai Kota Prabumulih	Jeruk Siam	16.74-3-B/I/23-141-11/2025		✓	produk dinyatakan aman dikonsumsi/level residu dibawah ambang batas
4	Hasanuddin	Jln. Raya Sungai Medang-Tanjung Telang Kelurahan Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih	Jambu Air	16.74-3-B/I/20-144-11/2025		✓	produk dinyatakan aman dikonsumsi/level residu dibawah ambang batas

Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Serta tersertifikasi Produk Prima 3 yaitu Komoditi Jamur Tiram, Slada Hidroponik,Jeruk Siam, Jambu Air yang dinyatakan aman dikonsumsi.

Berikut perhitungan persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan:

a. Capaian Pengawasan di Peredaran (Post market):

Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y)

$$= P/N \times 100\%$$

$$= 12/12 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Ket:

P = Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (Ada 12 sampel yang memenuhi syarat)

N = Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/ sampel yang diambil (Ada 12 sampel yaitu ketimun, Bawang merah, Bawang Putih, Cabe Merah, Serai, Kunyit, Kentang, Tomat, Kubis Terong, Sawi, wortel.

Capaian (K)

$$= Y/T \times 100\%$$

$$= 100/85 \times 100\%$$

$$= 117,6\%$$

Ket:

Y = Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran

T = Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T)

Capaian Tertimbang **(K1)**

$$= \text{Capaian (K)} \times 60\%$$

$$= 117,6 \% \times 60\%$$

$$= 70,56\%$$

b. Registrasi dan Sertifikasi (pre market)

Capaian Registrasi dan Sertifikasi merupakan penjumlahan antara izin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT, rumah kemas, health certificate (HC).

Pada tahun 2025 hanya terdapat 4 buah Sertifikat Produk Prima 3.

Capaian tertimbang (**K2**)

$$= 40\% \times X$$

$$= 40\% \times 20\%$$

$$= 8 \%$$

Ket:

Capaian (X), jika:

$$>200 = 100\%$$

$$150 - <200 = 90\%$$

$$100 - <150 = 80\%$$

$$70 - <100 = 60\%$$

$$40 - <70 = 50\%$$

$$10 - <40 = 40\%$$

$$<10 = 20\%$$

c. CAPAIAN TOTAL

$$= K1 + K2$$

$$= 70,56 \% + 8 \%$$

$$= \mathbf{78,56 \%}$$

Capaian indikator kinerja "Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan" tahun 2025 yaitu sebesar 78,56% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya 78,56%. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Pada tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 4 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani kumbung jamur milik Petani Bapak Muhammad Karyo Kelurahan Cambai, Petani Sayuran Hiroponik (sayuran Selada Keriting) Bapak Makmur Suyitno Kelurahan Muara Dua, Petani Jambu Air (jenis citra) Bapak Hasanudin Desa Tanjung Telang dan Petani Jeruk Siam Bapak

Suparman Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi tersebut atas uji residu pestisida.

1.4.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan
⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian kinerja indikator "Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan" Tahun 2025 (untuk tahun 2024) yaitu 74,34 dari target 74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,45%. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi Internal Kinerja Program, dan Laporan Kinerja , serta dokumen terkait lainnya.

Berikut ini penilaian SAKIP berdasarkan evaluasi manajemen kinerja yaitu:

Tabel 3.2.8 Penilaian SAKIP Tahun 2025 (untuk tahun 2024)

Komponen		Bobot	Nilai hasil evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30	25,71
b	Pengukuran Kinerja	30	20,86
c	Pelaporan Kinerja	15	12,56
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,21
TOTAL		100	74,34

Dari hasil evaluasi atas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2025 (untuk tahun 2024) tersebut diperoleh nilai sebesar 74,34 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 100,00 atau 74,34 dengan kategori BB yaitu interprestasi sangat baik (memadai), dimana akuntabilitas kinerjanya sangat baik. Namun demikian masih perlu perbaikan walaupun tidak mendasar.

Capaian kinerja indikator “Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan” adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian ini mencapai target di dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada tahun 2025 tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,8	94,03	94,59	94,3	94,34	100,04
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	0 Ton	0 Ton	9 Ton	7,8 Ton	6,4 Ton	82,05
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi	Pencapaian Skor Pola Pangan	85,2	93,1	89,2	93,7	91,24	97,37

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	2025		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Harapan (PPH) Konsumsi						
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7	2,7%	2,7%	0 %	0 %	100
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			78,56 %	100%	78,56%	78,56
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	71,56	79,77	79,77	73,99	74,34	100,4
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" tahun 2025 adalah sebesar 94,34 dari target sebesar 94,30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,04%. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Kondisi Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Prabumulih berdasarkan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Prabumulih Tahun 2025

No	Kelompok Bahan Pangan	2024		2025	
		Energi (kkal)	Skor PPH	Energi (kkal)	Skor PPH
1.	Padi-padian	1.154	24,04	1.152	23,99
2.	Umbi-umbian	98	2,05	26	0,54
3.	Pangan Hewani	334	13,9	337	24,00
4.	Minyak dan Lemak	556	24,00	554	5,00
5.	Buah/Biji Berminyak	10	0,21	0	0
6.	Kacang-kacangan	107	8,95	100	8,31
7.	Gula	188	2,50	188	3,91
8.	Sayuran dan Buah	134	27,84	148	30,00
9.	Lain-lain	-	-	-	0
	Jumlah	2.588	94,59	2.505	94,34

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di Kota Prabumulih Tahun 2025 berdasarkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah sebesar **94,34** yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 94,59. Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100

maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula dan sayuran dan buah, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian dan kelompok Kacang Kacangan.

Skor PPH Konsumsi tahun 2025 adalah sebesar 91,24, dimana skor PPH Ketersediaan sudah diatas skor PPH Konsumsi. Hal ini diakibatkan oleh belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat di Prabumulih. Dengan ditunjukkan dari konsumsi kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian, dan kelompok sayur-sayuran dan buah yang masih rendah. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh :

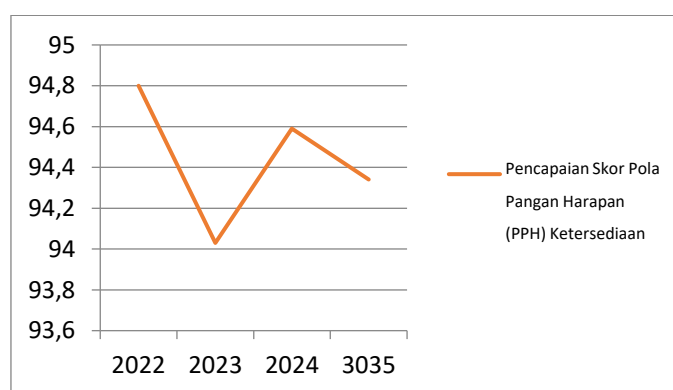
1. Masih rendahnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang masih rendah.
2. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman.
3. Masih terbatasnya akses terhadap komoditas pangan
4. Sistem distribusi pangan yang belum efektif dan efisien\
5. Produksi beberapa komoditas pangan yang masih rendah sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat mempengaruhi harga komoditas pangan di pasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pangan yang tersedia maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keseimbangan ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan melalui penambahan tingkat ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan. Untuk mendukung pencapaian target skor mutu pangan tersebut, dibutuhkan ketersediaan komoditas pangan dengan jumlah dan komposisi yang memadai. Untuk dapat mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan, perlu diketahui kemampuan produksi pangan Kota Prabumulih. Mengingat potensi Prabumulih di bidang pertanian masih cukup baik maka peningkatan produksi beberapa komoditas pangan seperti kelompok buah/biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Kacang Kacangan, kelompok sayuran dan buahan perlu terus dipacu sehingga dapat mempercepat waktu pencapaian skor normal mutu pangan PPH sebesar 100. Upaya perbaikan kualitas ketersediaan pangan ini harus ditempuh dengan pendekatan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Penyediaan pangan diutamakan melalui peningkatan produksi dalam daerah dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan konsumen.
2. Pengembangan sistem distribusi yang efisien dengan jangkauan wilayah pedesaan dan daerah terpencil sehingga harga di pasaran dapat ditekan.
3. Penciptaan mekanisme daya beli pasar yang mendukung terbentuknya harga yang terjangkau dan mampu memberikan insentif bagi produsen untuk menghasilkan produksi pangan.
4. Keterlibatan pemerintah dan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal.

5. Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan.

Berikut ini adalah Grafik Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Gambar 3.4

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup**

Berdasarkan grafik di atas, Capaian Skor PPH Ketersediaan selama periode 2022–2025 menunjukkan tren fluktuatif namun relatif stabil,. Terjadi penurunan pada tahun 2023, peningkatan kembali pada tahun 2024, dan sedikit penurunan pada tahun 2025. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh variasi ketersediaan komoditas tertentu, distribusi pangan, serta dinamika harga dan daya beli masyarakat. Meskipun mengalami naik-turun, nilai indikator masih berada pada kisaran yang stabil. Selanjutnya , diperlukan penguatan sistem stabilisasi pasokan dan pengendalian distribusi untuk meminimalkan fluktuasi.

1.1.1.2 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

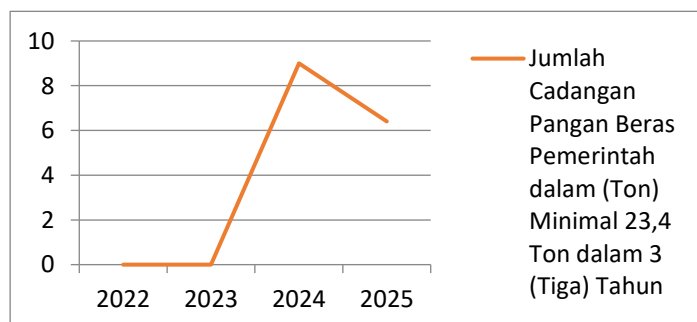
Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton)
Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun

Capaian indikator kinerja “Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun” tahun 2025 adalah sebesar 6,4 ton dari target 7,8 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82,05 %. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Namun bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 adalah realisasinya sebesar 9 Ton dari target sebesar 7,8 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,38 %.

Pengadaan cadangan pangan tahun 2025 dikarenakan izin prinsip pengadaan dari pihak Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel baru disetujui di akhir nopember 2025 sehingga ketersediaan anggaran uang persediaan tidak mencukupi untuk pengadaan 10 ton dikarenakan terlalu sedikit dengan waktu untuk melakukan TUP, selain itu diawal desember ada perubahan PA yang memerlukan waktu untuk perubahan administrasinya sedangkan penutupan administrasi akhir tahun di awal Desember.

Berikut ini adalah Grafik Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Gambar 3.5.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah

Berdasarkan grafik di atas, Tidak terdapat cadangan pangan pada tahun 2022–2023. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 9 ton sebagai bentuk penguatan kebijakan ketahanan pangan. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 6,4 ton. Penurunan ini dapat disebabkan oleh pemanfaatan cadangan untuk kebutuhan tertentu serta penyesuaian alokasi anggaran. Pada indikator ini menunjukkan adanya perbaikan sistem sejak 2024, namun perlu strategi agar jumlah cadangan tetap stabil dan optimal.

1.1.1.3 Sasaran

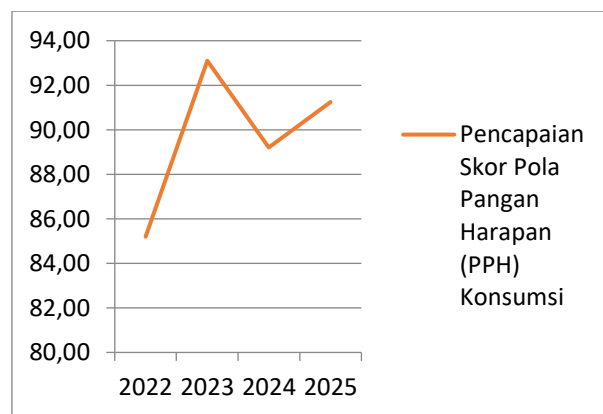
⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun 2025 yaitu sebesar 91,24 dari target 93,7 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 97,37 %. Namun bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar 93,1 dari target sebesar 85%. Penurunan sebesar 4 % ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA.

Berikut ini adalah Grafik Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :



Gambar 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Berdasarkan grafik di atas, PPH Konsumsi menunjukkan fluktuasi cukup tajam. Tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, kemudian menurun pada 2024, dan kembali meningkat pada 2025. Penurunan 2024 dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti Perubahan pola konsumsi dan faktor daya beli masyarakat. Meskipun fluktuatif, tren umum menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2022.

1.1.1.4 Sasaran

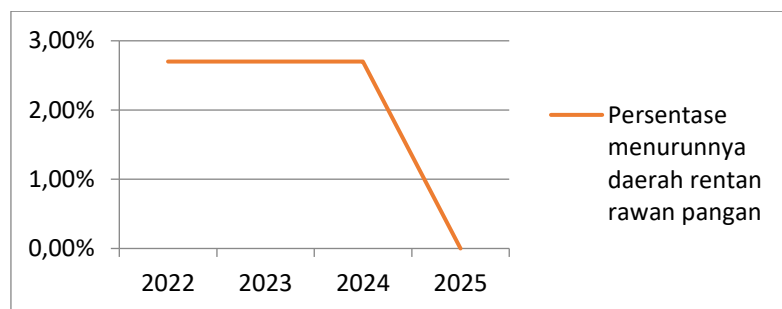
⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan" tahun 2025 yaitu sebesar 0 % dari target 0% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Berikut ini adalah Grafik Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Gambar 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Berdasarkan grafik di atas, selama tiga tahun berturut-turut indikator ini stagnan pada angka 2,7%. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan signifikan menjadi 0%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan ketahanan pangan yang lebih efektif pada tahun 2025. Meskipun demikian, diperlukan sistem pemantauan berkelanjutan agar kondisi 0% dapat dipertahankan.

1.1.1.5 Sasaran

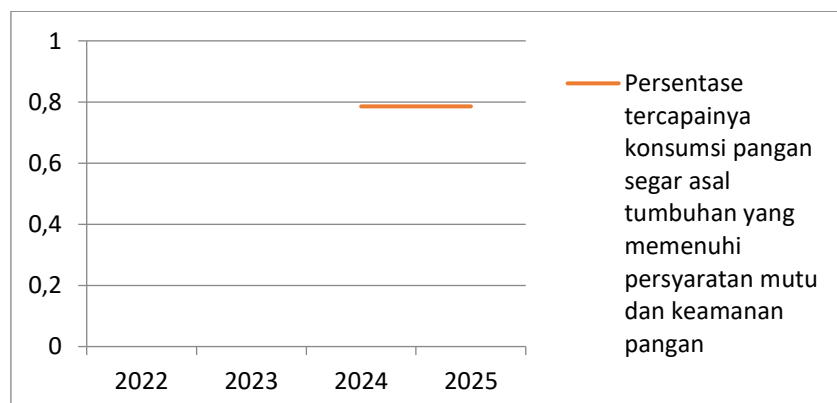
⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan" tahun 2025 yaitu sebesar 78,56 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya 78,56 %. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Pada tahun 2025, Dinas Ketahanan pangan ada 4 Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani kumbung jamur milik Petani Bapak Muhammad Karyo Kelurahan Cambai, Petani Sayuran HIropnik (sayuran Selada Keriting) Bapak Makmur Suyitno Kelurahan Muara Dua, Petani Jambu Air (jenis citra) Bapak Hasanudin Desa Tanjung Telang dan Petani Jeruk Siam Bapak Suparman Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi tersebut atas uji residu pestisida.

Berikut ini adalah Grafik Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Gambar 3.8.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran

Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Berdasarkan grafik di atas, Capaian indikator Konsumsi Pangan Segar (%) pada tahun 2025 sebesar 78,56%, sama dengan capaian tahun 2024. Meskipun tidak mengalami peningkatan, nilai indikator tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mampu mempertahankan capaian pada level yang baik.

1.4.1.6 Sasaran

⇒ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

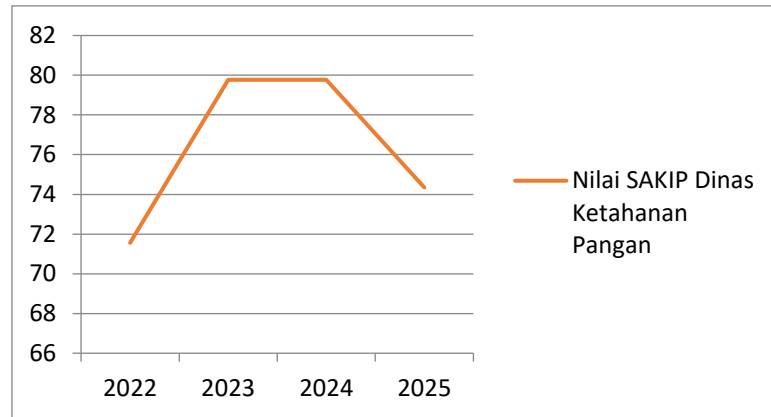
⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian kinerja indikator "Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan" Tahun 2025 (untuk tahun 2024) yaitu 74,34 dari target 74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,70%. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar 79,77 dari target 80, capaian menurun karena masih terdapat kelemahan pada komponen pelaporan kinerja.

Capaian kinerja indikator "Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan" adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian ini mencapai target di dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada tahun 2025 tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan

Berikut ini adalah Grafik Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Gambar 3.9.

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat
Daerah**

Berdasarkan diagram di atas, Nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 74,34 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 79,77. Namun demikian, capaian tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan tetap berada dalam kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya pada kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

1.4.1.7 Sasaran

⇒ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah

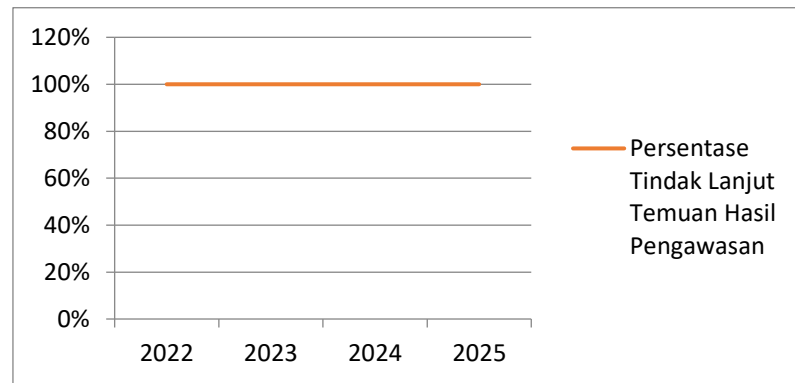
Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan
⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian indikator kinerja “Presentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan” tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 100 %. Capaian ini sudah mencapai target yang diperjanjikan.

Berikut ini adalah Diagram antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :



Gambar 3.10.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025 pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Berdasarkan diagram di atas, capaian tindak lanjut temuan konsisten sebesar 100% selama periode 2022–2025. Konsistensi ini menunjukkan komitmen instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KETAHANAN PANGAN periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,34	94,60	99,72
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	6,4 ton	23,4 ton	27,35
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,24	96,8	94,25
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	0	0%	100
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	78,56	100	78,56
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74,34	78	95,30
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" tahun 2025 adalah sebesar 94,34 dari target akhir renstra sebesar 94,60 sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 99,72%.

1.1.1.2 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (ton)
minimal 23,4 Ton dalam 3 (tiga) tahun

Capaian indikator kinerja "Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun" tahun 2025 adalah sebesar 6,4 ton dari target akhir renstra sebesar 23,4 Ton sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 27,35%. Capaian indikator tersebut masih tergolong rendah dikarenakan izin prinsip pengadaan dari pihak Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel baru disetujui di akhir nopember 2025 sehingga ketersediaan anggaran uang persediaan tidak mencukupi untuk pengadaan 10 ton dikarenakan terlalu sedikit dengan waktu untuk melakukan TUP, selain itu diawal desember ada perubahan PA yang memerlukan waktu untuk perubahan administrasinya sedangkan penutupan administrasi akhir tahun di awal Desember.

1.1.1.3 Sasaran

⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun 2025 yaitu sebesar 91,24 dari target akhir renstra sebesar 96,8 sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 94,25%. Jumlah skor PPH konsumsi adalah maksimal 100 dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 Kkal/Kap/Hari.

1.1.1.4 Sasaran

⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan" tahun 2025 yaitu sebesar 0 % dari target dari target akhir renstra sebesar 0%. Di capaian akhir renstra diharapkan tidak berada pada prioritas 1 s.d 3 dalam arti tidak ada wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih kecil.

1.1.1.5 Sasaran

⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan" tahun 2025 yaitu sebesar 78,56 % dari target akhir renstra sebesar 100 %. Sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 78,56%. Pada akhir renstra diharapkan jumlah ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan meningkat serta didukung dengan jumlah anggaran yang tercukupi sehingga tercapainya target konsumsi

pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

1.4.1.4 Sasaran

⇒ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan
⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian kinerja indikator "Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan" Tahun 2025 (untuk tahun 2024) yaitu 74,34 dari target akhir renstra 78. Sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 95,30%.

Capaian kinerja indikator "Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan" adalah sebesar 100% dari target akhir renstra sebesar 100%. Sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 100%.

3.1.5 Membandingkan Realiasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Daerah	Standar/ Target Nasional	selisih	keterangan
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,34	100	-5,66	Belum Memenuhi Standar
2	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah	6,4 ton	3 juta ton	2,9 juta ton	Belum memenuhi standar

3	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,24	95,1	-3,86	Belum Memenuhi Standar
4	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	78,56	100	-21,44	Belum Memenuhi Standar
5	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	0	-1%	1%	Tercapai
6	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74,34	60	14,34	Tercapai
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	0	Tercapai

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Realisasi capaian daerah sebesar 94,34, sedangkan target nasional sebesar 100, dengan selisih -5,66. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan keberagaman pangan yang tersedia di daerah masih belum sepenuhnya memenuhi komposisi ideal sesuai standar nasional, sehingga dikategorikan belum memenuhi standar.

1.1.1.2 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton)

Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun

Realisasi cadangan pangan beras pemerintah daerah sebesar 6,4 ton dan dinyatakan tercapai. Ketersediaan cadangan pangan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat atau gejolak harga.

1.1.1.3 Sasaran

⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Realisasi sebesar 91,24 dari target nasional 95,1, dengan selisih -3,86. Capaian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih belum sepenuhnya beragam, bergizi seimbang, dan sesuai dengan komposisi ideal yang dianjurkan.

Menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga dan tingkat pendidikan, sehingga masih perlu upaya peningkatan.

1.1.1.4 Sasaran

⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Realisasi menunjukkan angka 0, dengan target penurunan -1%, sehingga dinyatakan tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat peningkatan wilayah rentan rawan pangan, dan kondisi daerah relatif stabil.

1.1.1.5 Sasaran

⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Namun tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 4 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada yaitu Petani Bapak Muhammad Karyo Kelurahan Cambai, Petani Sayuran HIROPONIK (sayuran Selada Keriting) Bapak Makmur Suyitno Kelurahan Muara Dua, Petani Jambu Air (jenis citra) Bapak Hasanudin Desa Tanjung Telang dan Petani Jeruk Siam Bapak Suparman Kelurahan Sungai Medang. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

Solusi yang dilakukan agar meningkatnya persentase PSAT yaitu memperbanyak jumlah izin edar dan sertifikat yang diterbitkan. Untuk itu jumlah anggaran yang disediakan tercukupi untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

1.4.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Realisasi mencapai 100%, sesuai dengan target 100%, sehingga dinyatakan tercapai. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan secara tuntas.

1.4.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan
⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Nilai yang diperoleh sebesar 74,34, melampaui target 60, dengan selisih 14,34. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan baik dan melebihi standar minimal yang ditetapkan.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,30	94,34	100,04	Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum	Melakukan peningkatan produksi pangan yang masih rendah, pengendalian konsumsi yang berlebih, serta penguatan edukasi gizi masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan skor PPH dapat meningkat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula dan sayuran dan buah, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian dan kelompok Kacang kacangan	mendekati angka ideal dan mencerminkan pola pangan yang lebih beragam dan seimbang.
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8	6,4	82,05	Dikarenakan izin prinsip pengadaan dari pihak Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel baru disetujui di akhir nopember 2025 sehingga ketersediaan anggaran uang persediaan tidak mencukupi untuk pengadaan 10 ton dikarenakan terlalu	Melakukan pengadaan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Untuk jangka panjang, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara izin prinsip, ketersediaan anggaran, dan jadwal penutupan administrasi agar proses dapat berjalan dengan optimal.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sedikit dengan waktu untuk melakukan TUP, selain itu diawal desember ada perubahan PA yang memerlukan waktu untuk perubahan administrasinya sedangkan penutupan administrasi akhir tahun di awal Desember	
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,7	91,24	97,37	skor PPH yang belum mendekati angka 100 bahwa konsumsi pangan yang tinggi karbohidrat dan rendah variasi makanan menjadi salah satu faktor penyebab skor pph yang tidak ideal, Masih rendahnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang masih rendah, dan Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman.	Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga dan tingkat pendidikan
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	0	0	100	Tidak ada Desa/kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 - 3 yang terdapat di wilayah Kota Prabumulih	Melakukan pencegahan, penguatan sistem, stabilisasi pasokan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar turunnya daerah rentan rawan pangan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan di masa mendatang.
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman	Persentase tercapainya	100	78,56	78,56	Hasil tes residu pestisida secara	Jumlah anggaran yang disediakan tercukupi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan				keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Namun tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 4 sertifikat prima 3 yaitu Petani Bapak Muhammad Karyo Kelurahan Cambai, Petani Sayuran Hirononik (sayuran Selada Keriting) Bapak Makmur Suyitno Kelurahan Muara Dua, Petani Jambu Air (jenis citra) Bapak Hasanudin Desa Tanjung Telang dan Petani Jeruk Siam Bapak Suparman Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi tersebut atas uji residu pestisida.	untuk biaya pengujian laboratorium komoditi atas uji residu pestisida.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74	74,34	100,4	Kategori BB yaitu interpretasi sangat baik (memadai), dimana akuntabilitas kinerjanya sangat baik.	Evaluasi dan Perbaikan Kinerja
1.4.1.1		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100	Tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan,	Tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mempertahankan kondisi yang telah sesuai standar.

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula dan sayuran dan buah, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian dan kelompok Kacang kacangan.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan produksi pangan yang masih rendah, pengendalian konsumsi yang berlebih,

serta penguatan edukasi gizi masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan skor PPH dapat meningkat mendekati angka ideal dan mencerminkan pola pangan yang lebih beragam dan seimbang.

1.1.1.2 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton)

Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun

Dikarenakan izin prinsip pengadaan dari pihak Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel baru disetujui di akhir nopember 2025 sehingga ketersediaan anggaran uang persediaan tidak mencukupi untuk pengadaan 10 ton dikarenakan terlalu sedikit dengan waktu untuk melakukan TUP, selain itu diawal desember ada perubahan PA yang memerlukan waktu untuk perubahan administrasinya sedangkan penutupan administrasi akhir tahun di awal Desember.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Untuk jangka panjang, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara izin prinsip, ketersediaan anggaran, dan jadwal penutupan administrasi agar proses dapat berjalan dengan optimal.

1.1.1.3 Sasaran

⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga dan tingkat pendidikan.

Faktor – faktor internal yang mempengaruhi konsumsi, besar kecilnya konsumsi yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh :

- Pendapatan
- Perkiraan harga dimasa mendatang
- Harga barang yang bersangkutan
- Iklan
- Ketersediaan barang dan jasa
- Selera
- Mode
- Jumlah keluarga.

Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi pola konsumsi adalah :

- Kebudayaan dan status sosial
- Kebudayaan dan pendapatan
- Pendapatan dan selera
- Status sosial dan motivasi
- Harga dan pendapatan

1.1.1.4 Sasaran

⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Tidak ada Desa/kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 - 3 yang terdapat di wilayah Kota Prabumulih.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan, penguatan sistem, stabilisasi pasokan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar turunnya daerah rentan rawan pangan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan di masa mendatang.

1.1.1.5 Sasaran

⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Namun tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 4 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada yaitu Petani Bapak Muhammad Karyo Kelurahan Cambai, Petani Sayuran HIROPONIK (sayuran Selada Keriting) Bapak Makmur Suyitno Kelurahan Muara Dua, Petani Jambu Air (jenis citra) Bapak Hasanudin Desa Tanjung Telang dan Petani Jeruk Siam Bapak Suparman Kelurahan Sungai Medang. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

Solusi yang dilakukan agar meningkatnya persentase PSAT yaitu memperbanyak jumlah izin edar dan sertifikat yang diterbitkan. Untuk itu jumlah anggaran yang disediakan tercukupi untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	94,3	94,34	100,04	456.971.000	410.995.806	89,94	10,10
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	7,8	6,4	82,05	240.204.000	174.507.656	72,65	9,40
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	93,7	91,24	97,37	149.133.750	133.972.909	89,83	7,54
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	0	0	100,00	108.814.100	103.144.000	94,79	5,21
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	100	78,56	78,56	23.187.000	19.302.400	83,25	-4,69
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	74	74,34	100,46	2.539.200	2.538.000	99,95	0,51
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100,00	4.586.259.304	3.017.995.548	65,81	34,19

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

E : Efisiensi PAKi : Pagu anggaran keluaran I

RAKi : Realisasi anggaran keluaran I

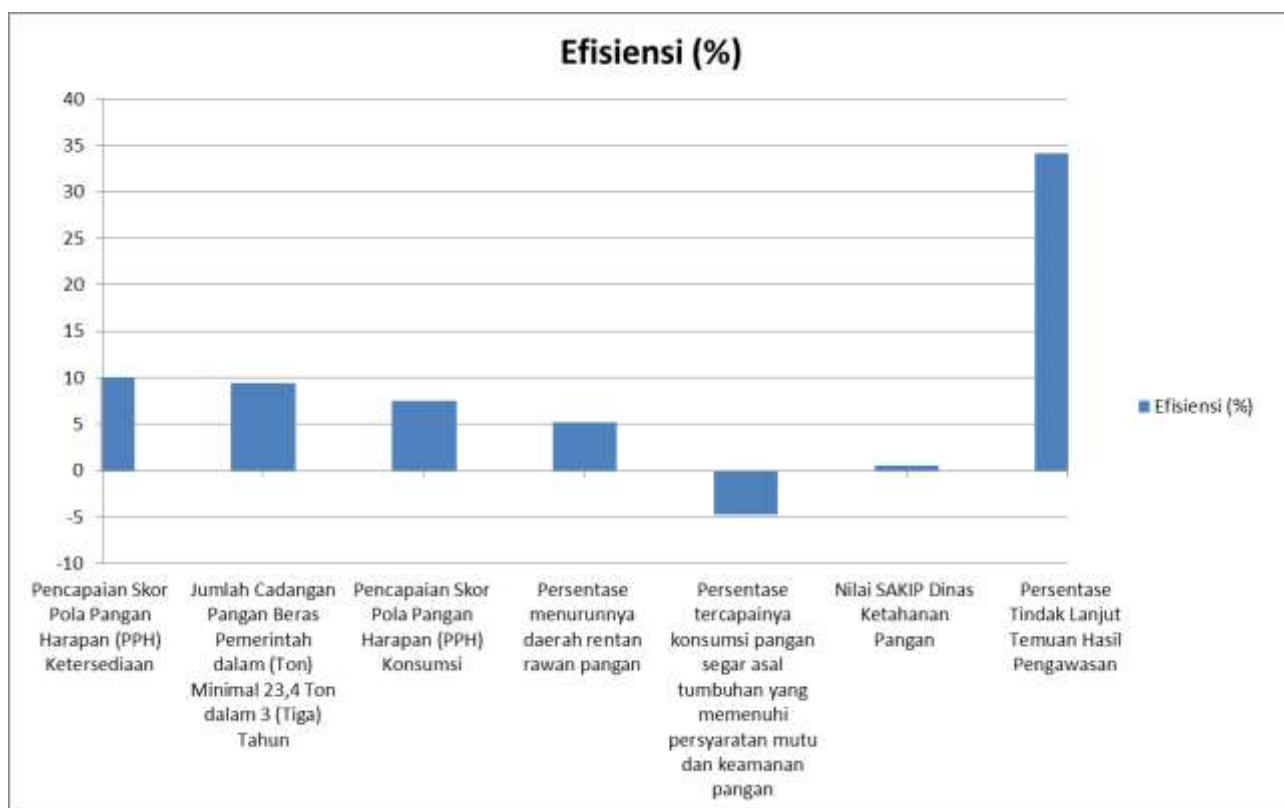
Cki : Capaian keluaran I

Nilai hasil rata-rata penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &= 10,10\% + 9,40\% + 7,54\% + 5,21\% + - 4,69\% + 0,51\% + 34,19\% \\ &= 62,27\% / 7 \\ &= \mathbf{8,9\%} \end{aligned}$$

Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam **kategori efisien**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2025.

Berikut ini adalah Grafik Efisiensi Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran :



Gambar. 3.11.

Efisiensi Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan dominasi nilai efisiensi positif pada sebagian besar indikator. Meskipun demikian, terdapat indikator dengan efisiensi negatif menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan penyelarasan antara perencanaan kinerja dan penganggaran pada tahun berikutnya.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100,04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	Menunjang	Capaian indikator melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat beserta seluruh kegiatan pendukungnya telah dilaksanakan secara optimal dan efektif dalam menjaga ketersediaan pangan daerah.
1.1.1.1.1.1				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.1				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.2				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Menunjang	
				pengembangan Usaha Pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.4				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.5				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.6				Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
1.1.1.1.1.1.7				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.8				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.9				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	100	Menunjang	
1.1.1.2.1	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	82,05	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	Menunjang	Capaian belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, seluruh kegiatan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Optimalisasi pengadaan dan penguatan manajemen cadangan pangan perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.
1.1.1.2.1.1				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.1				penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.2				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.4				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.3.1	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	97,37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	Menunjang	Capaian indikator mendekati target yang ditetapkan. Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
1.1.1.3.1.1				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	100	Menunjang	dalam penganekaragaman konsumsi pangan telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan edukasi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.
1.1.1.3.1.1.1				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.2				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman	100	Menunjang	
1.1.1.4.1	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	100	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	100	Menunjang	Target indikator tercapai sepenuhnya. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan telah dilaksanakan secara efektif sehingga tidak terdapat daerah rentan prioritas pada tahun pelaporan.
1.1.1.4.1.1				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Daerah Rawan Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.4.1.1.1				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	100	Menunjang	
1.1.1.4.1.2				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.4.1.2.1				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah	100	Menunjang	
1.1.1.5.1	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	78,56	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100	Menunjang	Capaian indikator belum optimal dibandingkan target yang ditetapkan. Meskipun

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
1.1.1.5.1.1				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100	Menunjang	kegiatan pengawasan keamanan pangan telah dilaksanakan 100%, diperlukan peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong peningkatan konsumsi pangan segar yang memenuhi standar mutu dan keamanan.
1.1.1.5.1.1.1				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.5.1.1.2				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.4.1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	100,46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	100	Menunjang	Capaian melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja dan keuangan telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
1.4.1.1.1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah disampaikan tepat waktu	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
1.4.1.1.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu			
1.4.1.1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.2.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
					mesteran SKPD			
1.4.1.1.1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang Disampaikan Tepat Waktu	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.3.1				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.4.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90	Menunjang	
1.4.1.1.1.4.2				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.1				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.2				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
1.4.1.1.1.5.3				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.5				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.1				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.3				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.4				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.7.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak Menunjang	Analisis
1.4.1.1.1.8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.8.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.8.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 melaksanakan 4 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan Kegiatan sampai Tahun 2025 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang ditetapkan, digambarkan dalam bentuk analisis kinerja pelayanan yang memuat atau mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024- 2026. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota prabumulih selama tahun anggaran 2025 telah dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tanpa mengabaikan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dapat terlihat dari rata-rata persentase capaian kinerja Program dan Kegiatan rata-rata persentase capaian kinerjanya berkisar antara 90% – 100% yang berarti termasuk kategori penilaian sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1.1.1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	456.971.000	410.995.806	89,94
1.1.1.1.1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	456.971.000	410.995.806	89,94
1.1.1.1.1.1.1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	29.607.000	28.539.000	96,39
1.1.1.1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	5.182.000	4.438.000	85,64
1.1.1.1.1.1.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44.222.000	43.246.500	97,79
1.1.1.1.1.1.4	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	272.830.000	256.012.000	93,84
	pengembangan Usaha Pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	43.435.000	28.024.000	64,52
1.1.1.1.1.1.6	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	17.865.000	17.479.000	97,84
1.1.1.1.1.1.7	Pemantauan Stok Pangan	12.775.000	11.767.000	92,11
1.1.1.1.1.1.8	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	11.725.000	6.371.306	54,34
1.1.1.1.1.1.9	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	6.553.000	3.850.000	58,75
1.1.1.1.1.1.10	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.777.000	11.269.000	88,20
1.1.1.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	240.204.000	174.507.656	72,65
1.1.1.2.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	240.204.000	174.507.656	72,65
	penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	80.385.000	74.049.000	92,12

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1.1.1.2.1. 1.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	135.228.000	85.073.656	62,91
1.1.1.2.1. 1.4	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	24.591.000	15.385.000	62,56
1.1.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	149.133.750	133.972.909	89,83
1.1.1.3.1 .1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	149.133.750	113.377.031	76,02
1.1.1.3.1. 1.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	16.041.000	4.787.250	29,84
1.1.1.3.1. 1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	133.092.750	108.589.781	81,59
1.1.1.4.1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	108.814.100	103.144.000	94,79
1.1.1.4.1 .1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	16.351.000	13.810.000	84,46
1.1.1.4.1. 1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	16.351.000	13.810.000	84,46
1.1.1.4.1 .2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.463.100	89.334.000	96,62
1.1.1.4.1. 2.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	92.463.100	89.334.000	96,62
1.1.1.5.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	23.187.000	19.302.400	83,25
1.1.1.5.1 .1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	23.187.000	19.302.400	83,25
1.1.1.5.1. 1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	13.432.000	11.582.400	86,23
1.1.1.5.1. 1.3	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.755.000	7.720.000	79,14

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1.4.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.588.798.504	3.020.533.548	65,82
1.4.1.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.539.200	2.538.000	99,95
1.4.1.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	447.300	447.000	99,93
1.4.1.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	447.300	447.000	99,93
1.4.1.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	447.300	447.000	99,93
1.4.1.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	447.300	447.000	99,93
1.4.1.1.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	750.000	100,00
1.4.1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.058.760.704	2.572.880.880	63,39
1.4.1.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.023.066.104	2.537.186.880	63,07
1.4.1.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.800.000	34.800.000	100,00
1.4.1.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	447.300	447.000	99,93
1.4.1.1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	447.300	447.000	99,93
1.4.1.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000	6.200.000	34,44
1.4.1.1.1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	6.200.000	34,44
1.4.1.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.628.000	14.072.000	59,56
1.4.1.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.050.000	9.710.000	74,41
1.4.1.1.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.578.000	4.362.000	41,24
1.4.1.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.864.600	175.665.000	96,06
1.4.1.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.983.000	4.732.000	94,96
1.4.1.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	7.514.000	83,49

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1.4.1.1.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	7.795.500	86,62
1.4.1.1.1.5.5	Penyediaan Bahan/Material	9.900.000	8.512.000	85,98
1.4.1.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.981.600	147.111.500	98,09
1.4.1.1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.110.000	153.910.000	93,78
1.4.1.1.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.680.000	98.180.000	99,49
1.4.1.1.1.6.3	Pengadaan Mebel	28.220.000	26.670.000	94,51
1.4.1.1.1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.210.000	29.060.000	78,10
1.4.1.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00
1.4.1.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
1.4.1.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.896.000	93.267.668	68,13
1.4.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.996.000	90.847.668	69,88
1.4.1.1.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	2.420.000	35,07

Sumber : LRA Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Anggaran Rp 846.308.750 dan terealisasi Rp 698.880.493 atau sebesar 82,58%.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp 108.814.100 dan terealisasi Rp 103.144.000 atau sebesar 94,79 %.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp 23.187.000 dan terealisasi Rp 19.302.400 atau sebesar 83,25 %.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp 4.588.798.504 dan terealisasi Rp 3.020.533.548 atau sebesar 65,82%.

Dapat disimpulkan bahwa untuk program urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp4.588.798.504 dan terealisasi Rp 3.020.533.548 atau sebesar 65,82% rendah dibanding dengan program peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan dikarenakan penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dimana Dinas Ketahanan pangan mempunyai target awal untuk 35 pegawai baik mutasi maupun pegawai PPPK, sedangkan realisasi sampe desember 2025 hanya 26 orang, tidak ada mutasi dan penambahan pegawai PPPK. Untuk sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasinya rendah karena tidak ada undangan bimbingan teknis, untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasinya rendah karena hanya terdapat beberapa perangkat yang memerlukan tindakan perbaikan. Rendahnya tingkat kerusakan perangkat menunjukan kondisi peralatan dan mesin yang relatif terjaga dengan baik sehingga tidak memerlukan perbaikan.

Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana. Kegiatan-kegiatan diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan target dan perencanaan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 6 sasaran strategis dengan 7 Indikator Sasaran yaitu 4 indikator sasaran tercapai dan 3 Indikator Sasaran tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah:
 - a. Menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA.
 - b. Dikarenakan izin prinsip pengadaan dari pihak Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel baru disetujui di akhir nopember 2025 sehingga ketersediaan anggaran uang persediaan tidak mencukupi untuk pengadaan 10 ton dikarenakan terlalu

sedikit dengan waktu untuk melakukan TUP, selain itu diawal desember ada perubahan PA yang memerlukan waktu untuk perubahan administrasinya sedangkan penutupan administrasi akhir tahun di awal Desember

- c. Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Namun tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 4 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani Bapak Muhammad Karyo Kelurahan Cambai, Petani Sayuran HIropnik (sayuran Selada Keriting) Bapak Makmur Suyitno Kelurahan Muara Dua, Petani Jambu Air (jenis citra) Bapak Hasanudin Desa Tanjung Telang dan Petani Jeruk Siam Bapak Suparman Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan promosi tentang pola Konsumsi pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat dan Diversifikasi Pangan dan Gizi masyarakat terutama kepada produk non beras dan terigu;
2. Dirasakan sangat penting untuk peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar, Registrasi, Rekomendasi dan Sertifikasi produk pangan segar di Tahun Anggaran selanjutnya.
3. Melakukan pengadaan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Untuk jangka panjang, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara izin prinsip, ketersediaan anggaran, dan jadwal penutupan administrasi agar proses dapat berjalan dengan optimal

4. Sosialisasi, bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP
5. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP
6. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Prabumulih, 09 Februari 2026
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Iking, SP
Pembina TK.I/Ivb
NIP. 197212311994032024

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DENGAN WALI KOTA PRABUMULIH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumarti, S.P., M.Si

Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Elman, S.T., M.M

Jabatan : Pj. Wali Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN
ESELON II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,3
2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8
3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,7
4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	0%
5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%
6	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74
7	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4,715,366,104	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	995,000,000	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	130,000,000	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35,000,000	

Pihak Kedua,

H. Elman, S.T., M.M

Prabumulih, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,

Sumarti, S.P., M.Si
NIP. 19740301 200312 2 003

Lampiran 2 Matriks Renstra (5 tahun)

Tabel 6.1 (TC.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebutuhan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024-2028

														Kendali Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Target	Rp				
			Kode Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP	B (60-70)		BB (71-75)		A (76-80)		A (76-80)					
					Nilai SAKIP	B (60-70)		BB (71-75)		A (76-80)		A (76-80)					
					Persentase Tidak Lampaui Target Hasil Pengawasan	100%		100%		100%		100%					
			X	XX	01		Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perencanaan dilaksanakan tepat waktu	100%	3.743.526.788	100%	4.444.526.788	100%	3.998.865.270	100%	12.178.118.830	
			X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD dilaksanakan tepat waktu	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	42.500.000	
			X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RDU/A)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RDU/A)	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	24.000.000
			X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu	100%	2.938.326.788	100%	2.888.326.788	100%	3.147.865.270	100%	8.974.518.830
			X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	35 Orang/Bulan	2.900.526.788	23 Orang/Bulan	2.850.526.788	30 Orang/Bulan	3.110.065.270	88 Orang 36 Bulan	8.961.118.830
			X	XX	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	3 Dokumen	104.400.000

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
			Kode Sub Kegiatan					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	3 Laporan	4.500.000
			X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	3 Laporan	4.500.000
			X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah yang Diampalkan Tepat Waktu	100%	7.200.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	43.200.000
			X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.200.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	3 Laporan	43.200.000
			X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	125.000.000
			X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	25.000.000	30 Paket	25.000.000	30 Paket	25.000.000	90 Paket	75.000.000
			X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	15 orang	50.000.000
			X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100%	365.000.000	100%	446.000.000	100%	452.000.000	100%	1.263.000.000
			X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	11.000.000	3 Paket	28.000.000
			X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000
			X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	35.000.000
			X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000
			X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.000.000	3 Paket	42.000.000
			X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	6 Laporan	1.100.000.000
								Rincian									
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah OH untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah)	1 Laporan	370.000.000	1 Laporan	370.000.000	1 Laporan	370.000.000	3 Laporan	1.010.000.000

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD					
			Kode Sub Kegiatan			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah OH Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah)	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	3 Laporan	90.000.000	
			X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100%	280.000.000	100%	350.000.000	100%	130.000.000	100%	1.180.000.000
			X	XX	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	1 Unit	600.000.000	-	1 Unit	600.000.000	
			X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	65.000.000	12 Unit	185.000.000
			X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	4 Unit	65.000.000	10 Unit	165.000.000
			X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000,00	-	0	1 Unit	250.000.000
			X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100%	3.500.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	9.900.000
			X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Material)	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.200.000	3 Laporan	9.900.000
			X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	540.000.000
			X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit	170.000.000	19 unit	170.000.000	19 unit	170.000.000	57 Unit	510.000.000
			X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	21 Unit	30.000.000
2	Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup						Indeks Kepuasan Masyarakat (PPH) Ketersediaan	94,1		94,3		94,5		94,6		
			2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Terepletnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	1.737.000.000	100%	1.862.000.000	100%	1.885.000.000	100%	5.484.000.000
			2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyuluhan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	802.000.000	100%	830.000.000	100%	1.020.000.000	100%	2.652.000.000

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
			Kode Sub Kegiatan					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	200.000.000
			2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	75.000.000
			2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	150.000.000	100 Keluarga	150.000.000	100 Keluarga	150.000.000	300 Keluarga	450.000.000
			2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	3 Laporan	950.000.000
			2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	300.000.000
			2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Ketenagakerjaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketenagakerjaan Distribusi Pangan	1 Unit	30.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	3 Unit	80.000.000
			2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
			2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	77.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	3 Laporan	207.000.000
			2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
			2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBSM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBSM)	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	3 Laporan	90.000.000
			2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Penetapan Terlaksananya Pengawasan Penetapan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000
			2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000
		Terdapatnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah							Jumlah cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (tiga) Tahun	7,8 ton		7,8 ton		7,8 ton	23,4 ton		

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
			Kode Sub Kegiatan				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	100%	300.000.000	100%	600.000.000	100%	350.000.000	100%	1.250.000.000	
			2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	1 Dokumen	250.000.000	
			2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	10 ton	250.000.000	20 ton	300.000.000	20 ton	300.000.000	50 Ton	850.000.000
			2	09	03	2.02	0005	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	20.000.000	10 ton	20.000.000	10 ton	20.000.000	30 Ton	60.000.000
			2	09	03	2.02	0006	Penyuluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyuluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 ton	30.000.000	10 ton	30.000.000	10 ton	30.000.000	30 Ton	90.000.000
		Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)						Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2		93,7		96,8		96,8		
			2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	100%	520.000.000	100%	417.000.000	100%	508.000.000	100%	1.537.000.000
			2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
			2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	540.000.000	2 Laporan	340.000.000	2 Laporan	400.000.000	6 Laporan	1.280.000.000
									Rincian:								
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Dapur B2SA)	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	240.000.000	1 Laporan	250.000.000	3 Laporan	640.000.000			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD			
			Kode Sub Kegiatan					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penguatan Kemandirian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Tertaksanannya Pemberdayaan masyarakat melalui Promosi dan edukasi Produk Pangan lokal Melalui Pameran dan pasar)	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	3 Laporan	400.000.000	
			2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	107.000.000	
		Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan						Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%		0%		0%		0%		
			2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%	345.000.000	2,7%	295.000.000	2,7%	395.000.000	2,7%	1.035.000.000
			2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Daerah Rawan Pangan	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	135.000.000
			2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	135.000.000
			2	09	04	2.02		Pengawasan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan	100%	300.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	900.000.000
			2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	900.000.000
		Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman						Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%		100%		100%		100%		
			2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	380.000.000
			2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	380.000.000
			2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	70.000.000

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
			Kode Sub Kegiatan				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	70.000.000
			2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	75.000.000
			2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	75.000.000
			2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000
			TOTAL							5.935.526.780		6.721.526.780		6.420.065.270		19.077.118.830	



Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Suranti, SP

Pembina TK. I / IV.b

NIP. 19640325 198708 2 001

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah



**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024**

NOMOR : 700/83.b/INSPEKTORAT.II/2025
TANGGAL : 6 OKTOBER 2025



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
INSPEKTORAT DAERAH

GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LT. 7 & 8
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 12 KEC. CAMBAI KODE POS 31141
TELP. (0713) 3520011 EXT. 6704 FAKS. (0713) 3520013 e-mail: inspektorat@kotaprabumulih.go.id
PRABUMULIH – SUMATERA SELATAN

Prabumulih, 6 Oktober 2025

Nomor : 700/ 83-b /Inspektorat.II/2025
Sifat : Rahasia
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Prabumulih Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih
di -
Prabumulih

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur atas nama Walikota Prabumulih Nomor: 700/109/ST/Inspektorat.II/2025 tanggal 25 Agustus 2025 telah dilaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan hasil yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja OPD;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas OPD;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi Internal Kinerja Program, dan Laporan Kinerja OPD, serta dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **74,34** dengan kategori **BB** yaitu interpretasi Sangat Baik, dimana akuntabilitas kinerjanya sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai Level Eselon 3/koordinator.

5. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 25,71
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen perencanaan kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu capaian kinerja belum dipantau secara berkala setiap triwulan sehingga rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis.
 - b. Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai sebesar 20,86
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup optimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
 - c. Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 12,56
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu Laporan Kinerja belum direviu secara internal yaitu dengan menyusun Laporan Hasil Reviu Internal dan menyertakan paraf hirarki dari penyusun sampai pimpinan atas draft rahir LKJIP.
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, memperoleh nilai sebesar 15,21
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:
 - 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkup OPD;
 - 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
 - 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
 - 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum berbasis Teknologi Informasi (Aplikasi);
6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, agar melakukan perbaikan sebagai berikut :
- 1) Melakukan pemantauan secara berkala setiap triwulan atas capaian kinerja sehingga rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis.
 - 2) Melakukan reviu internal, Menyusun Laporan Hasil Reviu Internal Laporan Hasil Reviu Internal dan menyertakan paraf hirarki dari penyusun sampai pimpinan atas draft rahir LKJIP
 - 3) Menyusun dan menetapkan Kebijakan SOP tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal;
 - 4) Meningkatkan kompetensi pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melaksanakan diklat/bimtek/workshop atau sejenis baik secara daring maupun tatap muka terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
 - 5) Melakukan pendalaman yang memadai tidak hanya sebatas penelaahan atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
 - 6) Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

PIL. INSPEKTUR DAERAH KOTA PRABUMULIH,

SAPTA PUTRA DEWANGGA, S.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197305102006041004

Tembusan :
Yth. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	KET
1	Melakukan pemantauan secara berkala setiap triwulan atas capaian kinerja sehingga rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis	Melakukan rapat evaluasi rutin secara berkala setiap triwulan untuk membandingkan realisasi dengan target atas capaian kinerja	12 Bulan	Januari s/d Desember 2025	Sekretaris Dinas	Telah mengadakan rapat internal dengan pegawai terkait perbandingan realisasi dengan target capaian kinerja sehingga pegawai lebih memahami dan responsif atas hasil pengukuran kinerja	
2	Melakukan reviu internal, menyusun laporan hasil reviu internal dan menyertakan paraf hierarki dari penyusun sampai pimpinan atas draft akhir LKJIP	Melakukan pemeriksaan secara internal terhadap realisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Melakukan penyertaan paraf hierarki sampai pimpinan dalam penyusunan draft akhir LKJIP	TW 1	Januari s/d Maret 2025	Sekretaris Dinas	Telah mengadakan rapat internal terkait pemantauan terhadap konsistensi data dengan dokumen pendukung sehingga terdapat kesesuaian antara realisasi dan target Telah melakukan penyertaan paraf pada draft akhir LKJIP secara berjenjang sampai pimpinan	
3	Menyusun dan menetapkan kebijakan SOP tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Melakukan rapat internal untuk penyusunan draft SOP tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Melakukan penetapan kebijakan SOP tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12 Bulan 12 Bulan	Januari s/d Desember 2025 Januari s/d Desember 2025	Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas	Telah mengadakan rapat internal dengan pegawai terkait penyusunan SOP sehingga dapat memperkuat pengendalian internal Telah melakukan penyusunan Draft SOP tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan akan dilanjutkan dengan proses pembahasan serta Penetapan SOP.	
4	Meningkatkan Kompetensi pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja internal melaksanakan diklat/bimtek/workshop atau sejenis baik secara daring maupun tatap muka terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Mengikuti diklat/bimtek/workshop atau sejenis baik secara daring maupun tatap muka terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal	12 Bulan	Januari s/d Desember 2025	Sekretaris Dinas	Inventarisasi Kebutuhan Pelatihan telah dilaksanakan denganikutsertaan dalam Bimtek dan Pelatihan	
5	Melakukan pendalaman yang memadai tidak hanya sebatas peneraian atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh SDM yang memadai	Melakukan pemantauan kinerja oleh atasan langsung (pimpinan unit/bidang) kepada staf secara sistematis	12 Bulan	Januari s/d Desember 2025	Sekretaris Dinas	Telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawah secara berjenjang	
6	Memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Memanfaatkan Aplikasi Smart SAKIP Kota Prabumulih dalam Penyusunan Laporan Kinerja	12 Bulan	Januari s/d Desember 2025	Sekretaris Dinas	Telah memanfaatkan Aplikasi Smart SAKIP Kota Prabumulih dalam Menyusun Laporan Kinerja	

Prabumulih, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Tifing, S.P.
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 197212311994032024

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2025

